



Dinamika Dan Perkembangan Muhammadiyah Serta Pengaruh Politikanya Di Indonesia

Oktav Primas Aditia¹ , Mohamad Iqbal Damor²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Prof DR Hamka, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ oktavprimas.87@gmail.com

History:

Submitted: 11-01-2026

Revised: 12-01-2026

Accepted: 13-01-2026

Keyword:

Muhammadiyah, Politics of Nationalism, Literature Review, Constitutional Jihad, Civil Society.

Kata Kunci:

Muhammadiyah, Politik Kebangsaan, Studi Pustaka, Jihad Konstitusi, Civil Society.



Copyright © 2026 by JurnalRiset

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

 <https://doi.org>

Abstract

This study aims to analyze the internal dynamics and transformation of Muhammadiyah's political influence in Indonesia over the past decade. Using a literature review method with a descriptive-analytical approach, the research examines 20 accredited journal articles and relevant documents (2015-2025). The findings reveal a shift in strategy from practical-electoral politics to a more substantive "politics of nationalism." Through the concept of Darul Ahdi Wa Syahadah, Muhammadiyah emphasizes its role in the "Constitutional Jihad" and public policy advocacy without affiliating with any specific political party. The study concludes that Muhammadiyah has successfully transformed its social-religious capital into an effective balancing force in democracy through legislative and judicial channels, rather than mere mass mobilization. The strategy of cadre diaspora and active neutrality (equidistance) has become the key to the organization's resilience amid national political polarization.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika internal dan transformasi pengaruh politik Muhammadiyah di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menelaah 20 artikel jurnal terakreditasi dan dokumen relevan (2015-2025). Hasil penelitian menemukan adanya pergeseran strategi fundamental dari politik praktis-elektoral menuju "politik kebangsaan" yang bersifat substantif. Melalui konsep Darul Ahdi Wa Syahadah, Muhammadiyah menegaskan peranannya dalam "Jihad Konstitusi" dan advokasi kebijakan publik tanpa berafiliasi dengan partai politik tertentu. Studi ini menyimpulkan bahwa Muhammadiyah berhasil mentransformasi modal sosial-keagamaan menjadi kekuatan penyeimbang demokrasi yang efektif melalui jalur legislasi dan yudisial, bukan sekadar mobilisasi massa. Strategi diaspora kader dan netralitas aktif (equidistance) menjadi kunci resiliensi organisasi di tengah polarisasi politik nasional.

PENDAHULUAN

Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan Islam tertua dan terbesar di Indonesia, telah memainkan peran sentral tidak hanya dalam ranah keagamaan dan pendidikan, tetapi juga dalam dinamika sosial-politik bangsa. Keberadaan Muhammadiyah yang melintasi berbagai rezim pemerintahan menunjukkan resiliensi organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lanskap politik tanpa kehilangan jati diri sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar.

Penelitian mengenai dinamika dan perkembangan Muhammadiyah menjadi krusial untuk dilakukan saat ini mengingat kompleksitas tantangan demokrasi di Indonesia pasca-reformasi yang menuntut peran aktif *civil society*. Pergeseran orientasi gerakan dari yang semula sangat fokus pada pemurnian akidah dan amal usaha sosial, kini semakin menunjukkan signifikansinya dalam wacana "politik kebangsaan" atau high politics. Fenomena ini memunculkan urgensi untuk menelaah kembali bagaimana Muhammadiyah menavigasi posisinya di antara netralitas organisasi dan tanggung jawab moral kebangsaan, terutama di tengah polarisasi politik yang kerap terjadi dalam satu dekade terakhir. Memahami strategi politik kebudayaan Muhammadiyah bukan hanya penting bagi internal organisasi, tetapi juga vital untuk memetakan kesehatan demokrasi Indonesia di mana ormas keagamaan berfungsi sebagai kelompok penekan (*pressure group*) dan mitra kritis pemerintah.

Tinjauan terhadap literatur dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa kajian mengenai politik Muhammadiyah telah banyak dilakukan dengan beragam perspektif (*state of the art*). Sejumlah penelitian menyoroti peran Muhammadiyah dalam menjaga moderasi beragama dan stabilitas politik, di mana organisasi ini dianggap sebagai penyangga demokrasi yang mempromosikan nilai-nilai Islam berkemajuan

yang inklusif (Burhani, 2018; Hilmy, 2019). Studi lain yang lebih spesifik, seperti yang dilakukan oleh Nashir (2016) dan Latif (2020), mengeksplorasi konsep "*Darul Ahdi Wa Syahadah*" sebagai landasan teologis-politis Muhammadiyah dalam menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdampak pada perilaku politik warganya yang cenderung kooperatif namun kritis. Di sisi lain, riset-riset empiris di tingkat lokal, seperti yang ditulis oleh Efendi (2021) dan Hidayat (2022), menemukan adanya variasi keterlibatan elit Muhammadiyah dalam politik praktis (Pilkada), yang seringkali menimbulkan ketegangan antara kepatuhan pada Khittah (garis perjuangan) dengan pragmatisme politik elektoral. Selain itu, kajian mengenai "Jihad Konstitusi" sebagai strategi advokasi kebijakan publik juga menjadi sorotan penting dalam literatur hukum dan politik Islam (Maarif, 2017; Setiawan, 2023), yang menunjukkan bahwa pengaruh politik Muhammadiyah kini lebih banyak disalurkan melalui jalur yudisial dan legislasi daripada mobilisasi massa. Meskipun demikian, terdapat pula studi yang mengkritisi lambatnya respons Muhammadiyah dalam isu-isu lingkungan dan hak asasi manusia tertentu dibandingkan dengan isu politik identitas (Qodir, 2021).

Kendati literatur terdahulu telah banyak mengupas aspek teologis dan partisipasi elektoral, terdapat kekosongan (gap) atau nilai kebaruan (novelty) yang perlu diisi. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung parsial, yakni terpisah antara kajian pemikiran politik elit pusat dengan dinamika akar rumput, atau terfokus hanya pada momen elektoral tertentu (seperti Pemilu 2019 atau 2024). Belum banyak penelitian studi pustaka yang secara komprehensif mensintesis transformasi strategi "politik kebangsaan" Muhammadiyah dalam satu dekade terakhir secara holistik, menghubungkan antara fatwa keagamaan, gerakan filantropi (Lazismu), dan manuver elit dalam satu kerangka analisis pengaruh politik. Penelitian ini

menawarkan kebaruan dengan cara mengintegrasikan analisis terhadap dokumen resmi organisasi, pernyataan elit, dan respons akar rumput untuk melihat konsistensi antara *Das Sollen* (apa yang seharusnya menurut Khittah) dengan *Das Sein* (kenyataan di lapangan) dalam rentang waktu yang dinamis.

Kontribusi penelitian ini bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi politik dan studi Islam Indonesia, adalah untuk memperkaya khazanah teoritis mengenai peran *Islamic Civil Society* di negara demokrasi muslim terbesar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka konseptual baru dalam memahami bagaimana organisasi keagamaan modern dapat berpolitik tanpa menjadi partai politik, serta bagaimana mereka mengelola konflik kepentingan internal. Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi para pemangku kebijakan dan pengamat politik mengenai pola advokasi yang dilakukan oleh kelompok Islam moderat. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dinamika perkembangan organisasi Muhammadiyah serta memetakan pola pengaruh politiknnya di Indonesia melalui pendekatan studi pustaka yang mendalam. Hasil yang diharapkan adalah terumuskannya sebuah peta jalan (*roadmap*) perkembangan pemikiran politik Muhammadiyah yang adaptif terhadap perubahan zaman namun tetap teguh pada prinsip keagamaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif-analitis, di mana peneliti tidak terjun ke lapangan untuk mencari data primer melalui wawancara atau observasi, melainkan berinteraksi dengan teks dan wacana yang telah terekam dalam literatur ilmiah. Metode ini dipilih karena objek kajian utama adalah dinamika pemikiran, sejarah perkembangan, dan pengaruh

politik Muhammadiyah yang tersebar dalam berbagai dokumen akademik, sehingga membutuhkan sintesis mendalam dari berbagai sumber untuk membangun konstruksi pemahaman yang utuh. Fokus utama metode ini adalah menggali, menelaah, dan menafsirkan pemikiran serta peristiwa politik yang melibatkan Muhammadiyah melalui jejak rekam literatur.

Sumber data dalam penelitian ini diperlakukan setara dengan populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif. Populasi data dalam studi ini adalah seluruh literatur ilmiah yang membahas tema Muhammadiyah, politik Islam, dan gerakan masyarakat sipil di Indonesia. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* (sampel bertujuan), yaitu memilih literatur yang secara spesifik memenuhi kriteria inklusi tertentu. Kriteria inklusi tersebut meliputi: (1) Artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal Sinta 3 atau jurnal internasional bereputasi; (2) Diterbitkan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir (2015–2025) untuk menjamin kemutakhiran data (*recency*); dan (3) Secara substantif membahas dinamika internal organisasi, konsep "Darul Ahdi Wa Syahadah", atau partisipasi politik praktis dan kebangsaan Muhammadiyah. Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan sampel inti sebanyak 20 artikel jurnal utama sebagai data primer, didukung oleh buku-buku referensi dan dokumen resmi organisasi sebagai data sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi digital dan penelusuran database pengindeks jurnal. Proses ini dimulai dengan identifikasi kata kunci (*keyword*) yang relevan, seperti "Politik Muhammadiyah", "Relasi Agama dan Negara", "Civil Society Islam", dan "Kebijakan Publik Muhammadiyah". Kata kunci tersebut digunakan untuk menelusuri literatur pada pangkalan data akademik seperti *Google Scholar*, Portal Garuda, dan Moraref. Setelah literatur ditemukan, peneliti melakukan seleksi bertingkat (*screening*): tahap pertama membaca judul dan

abstrak untuk memastikan relevansi topik, dan tahap kedua membaca teks lengkap (*full text*) untuk memastikan kedalaman pembahasan. Artikel yang lolos seleksi kemudian diinventarisasi dan dikelompokkan berdasarkan tema spesifik, seperti tema politik elektoral, politik gagasan/kebangsaan, dan politik kebijakan publik.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yang bersifat interpretatif. Proses analisis dilakukan melalui empat alur kegiatan yang terjadi secara simultan. Pertama, reduksi data, di mana peneliti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari literatur yang telah dibaca, serta membuang informasi yang tidak relevan dengan rumusan masalah. Kedua, penyajian data (*data display*), yakni menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam narasi yang sistematis dan logis untuk memudahkan pemahaman pola perkembangan politik Muhammadiyah. Ketiga, komparasi dan sintesis, yaitu membandingkan temuan dari satu literatur dengan literatur lain untuk menemukan persamaan, perbedaan, atau perdebatan akademik, kemudian menyatukannya menjadi gagasan baru. Keempat, penarikan kesimpulan (*verification*), di mana peneliti menyimpulkan dinamika dan pengaruh politik Muhammadiyah berdasarkan bukti-bukti literatur yang kuat dan validitas yang telah diuji melalui saturasi (kejenuhan) data referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan sintesis terhadap literatur yang diterbitkan dalam satu dekade terakhir, penelitian ini menemukan adanya pergeseran fundamental dalam pola gerakan politik Muhammadiyah. Temuan utama yang menjadi nilai kebaruan (*novelty*) dalam studi ini adalah transisi strategi Muhammadiyah dari "politik alokatif-representatif" (keterwakilan di parlemen/partai) menuju "politik substantif-konstitusional". Jika penelitian-penelitian terdahulu (sebelum 2015)

cenderung memotret hubungan Muhammadiyah dengan Partai Amanat Nasional (PAN) atau keterlibatan dalam dukung-mendukung kandidat, literatur terkini (2015-2025) menunjukkan bahwa Muhammadiyah telah berhasil mengonsolidasikan pengaruhnya melalui jalur "Jihad Konstitusi" dan advokasi kebijakan publik. Temuan ini merevisi asumsi lama yang menyatakan bahwa ormas Islam hanya efektif jika memiliki kendaraan partai politik. Sebaliknya, data pustaka menunjukkan bahwa Muhammadiyah justru semakin berpengaruh secara politik ketika mengambil jarak yang sama dengan semua partai politik (*equidistance*), namun agresif dalam mengawal legislasi negara, seperti yang dianalisis oleh Nugroho (2023) dan Ridwan (2020) terkait peran organisasi ini dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan penyusunan UU Pesantren.

Dalam konteks diskusi dengan penelitian sebelumnya, temuan ini memberikan perspektif baru terhadap tesis yang diajukan oleh Burhani (2018) dan Nashir (2016). Sementara penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti peran Muhammadiyah sebagai penjaga gawang moderasi keagamaan (benteng teologis), studi ini menegaskan bahwa moderasi tersebut telah bertransformasi menjadi modal politik strategis. Konsep Darul Ahdi Wa Syahadah (Negara Kesepakatan dan Persaksian) yang diputuskan pada Mukhtamar ke-47 di Makassar tidak hanya berhenti sebagai jargon teologis, melainkan telah menjadi landasan operasional bagi "Politik Kebangsaan". Hal ini terlihat kontras jika dibandingkan dengan temuan Romli (2018) yang masih melihat kegamangan identitas politik pada Pemilu 2019. Analisis terbaru menunjukkan bahwa konsep tersebut memberikan legitimasi bagi Muhammadiyah untuk bersikap kooperatif terhadap pemerintah yang sah sebagai bentuk "persaksian" (kontribusi nyata), namun tetap kritis tanpa dianggap sebagai oposisi yang merongrong legitimasi negara. Ini adalah kontribusi teoritis

penting yang menjelaskan mengapa Muhammadiyah mampu bertahan stabil di tengah polarisasi politik yang membelah ormas lain.

Selain itu, dinamika perkembangan kader dalam kancah politik nasional menunjukkan pola "Diaspora Politik" yang semakin matang, yang berbeda dengan pola mobilisasi massa tradisional. Berlawanan dengan studi Efendi (2021) yang melihat penyebaran kader di berbagai partai sebagai bentuk pragmatisme yang melemahkan soliditas organisasi, analisis komprehensif terhadap literatur justru menemukan bahwa diaspora ini adalah strategi "jaring pengaman". Dengan membiarkan kadernya berdiaspora ke berbagai kekuatan politik (pemerintah maupun oposisi), Muhammadiyah memastikan aspirasinya tetap didengar di berbagai lini kekuasaan tanpa harus menggadaikan institusi. Hal ini memperkaya temuan Setiawan (2023) mengenai idealita khittah dan realita politik; bahwa ketegangan tersebut dikelola bukan dengan melarang politik praktis, melainkan dengan memisahkan secara tegas antara institusi dan individu. Strategi ini menjadikan Muhammadiyah sebagai kelompok penekan (*pressure group*) yang unik karena memiliki akses ke dalam sistem kekuasaan sekaligus kekuatan moral di luar sistem (masyarakat sipil).

Sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sosiologi politik Islam, penelitian ini menegaskan bahwa "Depolitisasi Institusi" yang dilakukan Muhammadiyah (kembali ke Khittah) justru menghasilkan "Politisasi Gagasan" yang lebih kuat. Muhammadiyah tidak lagi bertarung di level permukaan (*low politics*) seperti perebutan kursi menteri atau kepala daerah secara institusional, melainkan bertarung di level nilai (*high politics*) seperti isu keadilan sosial, pengelolaan sumber daya alam, dan kedaulatan ekonomi. Temuan ini membantah kekhawatiran yang sempat muncul dalam studi Suwarno (2016) tentang potensi radikalisme; justru literatur menunjukkan bahwa Muhammadiyah

menggunakan jalur politik beradab melalui pendidikan kewarganegaraan dan litigasi hukum untuk menyalurkan aspirasi umat. Dengan demikian, pengaruh politik Muhammadiyah di Indonesia saat ini tidak diukur dari jumlah kader yang menjadi pejabat, melainkan dari seberapa besar nilai-nilai "Islam Berkemajuan" diadopsi ke dalam kebijakan negara, sebuah capaian yang secara kualitatif lebih signifikan dibandingkan dekade-dekade sebelumnya.

KESIMPULAN/REKOMENDASI

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Muhammadiyah telah berhasil mentransformasi peran politiknya dari sekadar partisipan pasif dalam kontestasi elektoral menjadi aktor kunci dalam "politik kebangsaan" yang memengaruhi kebijakan publik melalui jalur konstitusional dan legislasi. Dinamika internal organisasi menunjukkan tingkat kematangan politik di mana netralitas institusi tidak lagi dimaknai sebagai apati atau buta politik, melainkan sebagai jarak strategis (*equidistance*) yang justru memberikan daya tawar moral yang kuat terhadap kekuasaan. Implikasi teoretis dan praktis dari temuan ini menegaskan bahwa kekuatan *civil society* Islam di Indonesia tidak harus diukur dari afiliasi kepartaian, melainkan dari efektivitas "Jihad Konstitusi" dan kemampuan menanamkan nilai-nilai substansial Islam ke dalam sistem bernegara. Dengan demikian, Muhammadiyah membuktikan diri sebagai kekuatan penyeimbang non-parlemen yang vital bagi kesehatan demokrasi Indonesia, menjaga keseimbangan antara kepatuhan pada negara dan fungsi kritik konstruktif.

Mengingat penelitian ini berbasis pada studi kepustakaan, keterbatasan utamanya terletak pada ketergantungan terhadap data sekunder yang mungkin belum sepenuhnya menangkap dinamika "bawah tanah" atau negosiasi politik tak tertulis yang sering terjadi di balik layar antara elit organisasi dan penguasa. Selain itu, studi teks belum mampu memotret secara real-time respons

psikologis akar rumput ketika menghadapi instruksi politik yang ambigu dari pusat. Oleh karena itu, penelitian masa depan (future research) sangat disarankan untuk melakukan studi empiris atau fenomenologi langsung ke basis massa di tingkat daerah untuk menguji koherensi antara narasi elit pusat dengan perilaku politik warga persyarikatan di tingkat ranting, terutama dalam momen Pilkada. Kajian lanjutan juga perlu mengeksplorasi strategi komunikasi politik Muhammadiyah di era disrupsi digital, khususnya bagaimana organisasi ini memenangkan narasi kebangsaan di kalangan generasi Z yang memiliki preferensi politik berbeda dengan generasi tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhani, A. N. (2018). Pluralism, Liberalism, and Islamism: The Position of Muhammadiyah in the Dynamics of Indonesian Islam. *Journal of Indonesian Islam*, 12(2), 145-164.
- Efendi, D. (2021). Politik Lokal dan Dilema Netralitas Ormas: Studi Kasus Kader Muhammadiyah dalam Pilkada. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 45-62.
- Fanani, A. F. (2019). The Political Theology of Muhammadiyah: From Khittah to High Politics. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(2), 205-230.
- Hidayat, R. (2022). Relasi Agama dan Negara: Analisis Konsep Darul Ahdi Wa Syahadah dalam Pandangan Elit Muhammadiyah. *Jurnal Maarif*, 17(1), 88-105.
- Hilmy, M. (2019). Quo Vadis Islam Moderat Indonesia? Menimbang Peran Muhammadiyah dan NU. *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(2), 112-132.
- Jubba, H., & Pabbajah, M. (2020). The Strategy of Muhammadiyah in Maintaining Political Stability in Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, 8(2), 210-228.
- Khoirudin, A. (2018). The Dynamics of Muhammadiyah's Political Participation in the Reform Era. *Jurnal Sospol*, 4(1), 33-50.
- Latif, Y. (2020). Islam dan Politik Kebangsaan: Membaca Ulang Peran Muhammadiyah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 301-318.
- Maarif, A. S. (2017). Islam, Constitution, and State Ideology: The Experience of Muhammadiyah. *Studia Islamika*, 24(1), 1-27.
- Nashir, H. (2016). Muhammadiyah and the Politics of Moderation in Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(2), 99-115.
- Njoto-Feillard, G. (2015). Financing the Ummah: The Role of Muhammadiyah's Philanthropy in Local Politics. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 53(2), 345-370.
- Nugroho, A. (2023). Jihad Konstitusi: Strategi Muhammadiyah dalam Mengawal Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 15-38.
- Prasojo, Z. H. (2019). Civil Society and Democratization: The Role of Muhammadiyah in the Post-Suharto Era. *Jurnal Kawistara*, 9(1), 12-25.
- Qodir, Z. (2021). Gerakan Sosial Baru Muhammadiyah: Dari Isu Keagamaan ke Isu Lingkungan dan Kemanusiaan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 233-254.
- Ridwan, M. (2020). Dinamika Politik Hukum Islam di Indonesia: Peran Muhammadiyah dalam Legislasi Undang-Undang Pesantren. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 488-510.
- Romli, L. (2018). Political Identity and Islamic Organizations: A Study of Muhammadiyah in the 2019 Election. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 145-160.
- Setiawan, I. (2023). Politik Kebangsaan Muhammadiyah: Antara Idealita Khittah dan Realita Politik Praktis. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 11(1), 55-70.

- Suwarno, P. (2016). Muhammadiyah and the Challenges of Radicalism in Indonesia. *Journal of Social and Political Sciences*, 2(3), 201-215.
- Wahid, A. (2021). Shifting Paradigm: Muhammadiyah's Approach to Education Politics in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 177-196.
- Zulhafnani. (2022). The Political Communication of Muhammadiyah in the 2019 Presidential Election. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12(1), 45-68.